

ABSTRAK

Anas Bayan Mubarak (2210110004/2025): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan Berbasis Layanan Urun Dana (*Crowdfunding*) di PT. Dana Syariah Indonesia

Perkembangan financial technology (fintech) telah melahirkan berbagai inovasi pembiayaan, salah satunya melalui skema urun dana (*crowdfunding*). PT. Dana Syariah Indonesia merupakan salah satu penyelenggara fintech syariah yang menerapkan skema crowdfunding sebagai sarana penyertaan dana masyarakat. Meskipun mengklaim beroperasi berdasarkan prinsip syariah, praktik penyertaan dana tersebut tetap memerlukan kajian mendalam untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait mekanisme penyertaan dana, pelaksanaan akad, dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) mekanisme penyertaan dana berbasis crowdfunding di Dana Syariah Indonesia; (2) pelaksanaan akad dalam penyertaan dana dengan skema crowdfunding di Dana Syariah Indonesia; dan (3) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyertaan dana dengan skema crowdfunding di Dana Syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta dokumen akad dan ketentuan yang berlaku di Dana Syariah Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyertaan dana berbasis crowdfunding di Dana Syariah Indonesia dilakukan melalui platform digital dengan mempertemukan pemberi dana dan penerima dana, di mana Dana Syariah bertindak sebagai pengelola dana melalui rekening penampungan (*escrow account*). Secara umum mekanisme tersebut telah memenuhi karakteristik crowdfunding, namun masih terdapat kelemahan dalam aspek transparansi dan penggunaan bank penampungan yang belum sepenuhnya berbasis syariah. Pelaksanaan akad dalam penyertaan dana menggunakan akad wakalah bi al-ujrah antara pemberi dana dan Dana Syariah, serta akad murabahah antara Dana Syariah dan penerima dana. Akan tetapi, ketentuan mengenai besaran ujah dan batasan tanggung jawab wakil belum dijelaskan secara rinci dalam akad, sehingga berpotensi menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*). Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penyertaan dana dengan skema crowdfunding di Dana Syariah Indonesia pada prinsipnya telah mengadopsi akad syariah dan menghindari unsur yang dilarang, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepatuhan syariah karena masih terdapat ketidaksesuaian dengan fatwa DSN-MUI, khususnya terkait transparansi ujah dan penggunaan bank konvensional sebagai escrow account.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan penyempurnaan dalam aspek akad, transparansi pengelolaan dana, serta kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi syariah agar praktik crowdfunding di Dana Syariah Indonesia benar-benar sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Urun Dana (*Crowdfunding*); *Wakalah bi al Ujah*; Dana Syariah; Fintech Syariah

ABSTRACT

Anas Bayan Mubarak (2210110004/2025): Sharia Economic Law Review on Crowdfunding-Based Financing at PT. Dana Syariah Indonesia

The development of financial technology (fintech) has given rise to various financing innovations, one of which is crowdfunding. PT. Dana Syariah Indonesia is one of the Islamic fintech platforms that implements a crowdfunding scheme as a means of public fund participation. Although it claims to operate based on Islamic principles, the implementation of such funding mechanisms requires further examination to assess its compliance with Sharia economic law, particularly concerning funding mechanisms, contract implementation, and adherence to DSN-MUI fatwas.

This study aims to analyze: (1) the mechanism of crowdfunding-based fund participation at Dana Syariah Indonesia; (2) the implementation of contracts in crowdfunding-based fund participation at Dana Syariah Indonesia; and (3) the perspective of Sharia economic law on crowdfunding-based fund participation at Dana Syariah Indonesia. The research employs a descriptive-analytical method with a normative juridical approach. Data were collected through literature review and documentation studies of laws and regulations, DSN-MUI fatwas, as well as contractual documents and operational provisions applied by Dana Syariah Indonesia.

The findings reveal that the crowdfunding fund participation mechanism at Dana Syariah Indonesia is conducted through a digital platform that connects fund providers and fund recipients, with Dana Syariah acting as the fund manager through an escrow account. In general, this mechanism meets the characteristics of crowdfunding; however, there are shortcomings in terms of transparency and the use of escrow accounts that are not fully Sharia-based. The implementation of contracts involves a *wakalah bi al-ujrah* contract between fund providers and Dana Syariah, and a *murabahah* contract between Dana Syariah and fund recipients. Nevertheless, the provisions regarding the amount of *ujrah* and the scope of the agent's responsibility are not clearly stipulated in the contract, potentially leading to elements of uncertainty (*gharar*). From the perspective of Sharia economic law, the crowdfunding practices at Dana Syariah Indonesia have generally adopted Sharia contracts and avoided prohibited elements; however, they have not fully achieved Sharia compliance due to inconsistencies with DSN-MUI fatwas, particularly regarding *ujrah* transparency and the use of conventional banks as escrow accounts.

Therefore, this study concludes that improvements are necessary in contractual arrangements, fund management transparency, and compliance with Sharia regulations to ensure that crowdfunding practices at Dana Syariah Indonesia are fully aligned with the principles of Sharia economic law.

Keywords: *Crowdfunding; Wakalah bi al Ujrah; Dana Syariah; Islamic Fintech*